Indonesia for Global Justice

**Artikel IGJ/*2018***

# Konsolidasi Gerakan Keadilan Global: "Agenda Pasar Bebas & Negara Dunia Selatan Setelah Brexit"

**London, 3 Oktober 2018.** Global Justice Now (GJN) bersama-sama dengan Indonesia for Global Justice (IGJ) menggelar diskusi dengan tema "Our World is Not For Sale: Trade Deals & Global South After Brexit". Diskusi ini untuk membaca perkembangan agenda pasar bebas, khususnya di negara dunia selatan, pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah "Brexit". Acara diskusi yang dilangsungkan di London (3/10) ini dihadiri oleh sejumlah aktivis Inggris baik yang bergerak diberbagai isu seperti lingkungan, serikat buruh, hak asasi manusia, dan lainnya.

Kolaborasi antara Global Justice Now (GJN) dan Indonesia for Global Justice (IGJ), dua organisasi yang sama-sama mengusung nama dan agenda "Keadilan Global", baru pertama kali ini dilakukan. Dua pimpinan organisasi, Nick Dearden dan Rachmi Hertanti, memberikan paparan mengenai situasi pasar bebas global yang berkembang saat ini, khususnya dalam situasi menguatnya kelompok sayap kanan di beberapa negara Eropa dibawah perspektif ultra-nasionalisme.

***" Trade is always about Power, and there is no magic from the trade deals that will make the world better " (Nick Dearden-Oct 2018)***

## Transaksi Perdagangan Pasca Brexit

Pasca hasil referendum Inggris yang pada akhirnya menunjukan hasil mayoritas suara menginginkan keluar dari Uni Eropa terus menjadi perhatian

*Ket.Foto (didepan ki-ka): James Onions (moderator-GJN), Rachmi Hertanti (Direktur IGJ), dan Nick Dearden (Direktur GJN)*

dunia. Agenda Brexit dan arah kebijakan perdagangan internasional Inggris sangat seksi untuk terus dianalisis.

Direktur Global Justice Now, Nick Dearden, menegaskan bahwa arah politik dan kebijakan Inggris pasca Brexit hanya ingin memperkuat kembali mantra "Perdagangan Bebas" yang sudah sejak dari beberapa abad yang lalu menjadi kebijakan utama Imperium Inggris.

Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa selama tiga dekade, dogma seputar Perdagangan Bebas saat ini dirasa mulai runtuh. Dampak buruk dari perjanjian perdagangan bebas (FTA) mulai dirasakan oleh masyarakat di negara-negara utara. Dipercayai oleh Pemimpin Negara Utara, bahwa FTA tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendorong jurang kemiskinan semakin dalam. Bahkan Mantra FTA dipercaya telah menciptakan ketidaksetaraan (Inequality) di Dunia, khususnya dunia utara.

Situasi frustasi ini di negara utara, khususnya paska krisis ekonomi 2008, telah membentuk kebijakan politik di negara utara. Mereka menggunakan kekuatan gelombang penolakan terhadap agenda globalisasi untuk mendukung kebijakan politiknya yang cenderung memperkuat politik beraliran ultra-nasionalisme seperti di Amerika Serikat, Fasisme di Italia, dan kelompok sayap kanan di Eropa. Bahkan, hari ini rezim otoritarianisme semakin menguat di dunia.

Begitupun dengan Inggris dengan ide Brexitnya. Namun, pasca Brexit yang terjadi saat ini malah terjadinya pemassifan berbagai transaksi perdagangan yang hendak didorong oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, dengan berbagai negara dan kawasan seperti negosiasi FTA dengan Amerika Serikat, bahkan rencana untuk bergabung dengan anggota Trans-Pacific Partnership (TPP) yang sekarang sudah berganti nama menjadi CP-TPP. "dengan kebijakan ini, situasi ekonomi inggris tidak akan lebih baik, bahkan bisa semakin lebih buruk dari Brexit", tegas Nick.
Menurut Nick, Perjanjian Perdagangan Bebas selalu mengenai kekuatan. Dan tidak ada sulap dari FTAs yang dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah, bagaimana kekuatan itu digunakan. Perjanjian perdagangan bebas adalah instrument yang dipakai oleh kekuatan ekonomi besar seperti Transnational Korporasi untuk menguasai. Lebih banyak hal-hal yang diatur untuk memfasilitasi kepentingan mereka ketimbang rakyat, khususnya terkait dengan aturan yang memberikan perlindungan

maksimum bagi Investor baik yang ada di dalam Perjanjian perdagangan bebas maupun perjanjian investasi.

Salah satu instrument yang dipakai oleh TNCs untuk memperkuat pengaruhnya di dunia adalah dengan menerapkan mekanisme gugatan investor terhadap negara dalam sengketa investasi atau yang dikenal dengan istilah investor-state dispute settlement (ISDS), dimana Investor dapat menggugat negara ketika dirasa kebijakan nasional negara mengancam kepentingan profit mereka. Mekanisme ini rencananya akan dimasukan ke dalam perjanjian FTA antara Inggris dengan Amerika. Berbagai pengalaman telah membuktikan bagaimana Mekanisme ISDS ini telah berdampak terhadap kedaulatan negara, tidak hanya di negara dunia selatan tetapi juga negara dunia utara.

***" We make a national law not based on the Constitution, but based on International Agreement. So, where is our Sovereignty? "***
***(Rachmi Hertanti, Oct 2018)***

## Perlawanan Dari Selatan

Gerakan ekonomi politik global yang cenderung anti-globalisasi, khususnya oleh Negara di Utara, sebenarnya telah didesakan sejak lama oleh negara-negara dunia di bagian selatan. Perlawanan terhadap agenda pasar bebas oleh negara dunia ketiga dilancarkan ketika World Trade Organization (WTO) disahkan pada tahun 1995. Bahkan sampai sekarang, Indonesia masih merasakan dampak buruk WTO.

Walaupun cenderung anti-globalisasi, negara maju di belahan dunia utara masih menggunakan sistem liberal ini untuk terus menekan negara berkembang di selatan khususnya seperti Indonesia. Mereka menggunakan isu ini untuk mendapatkan 'transaksi perdagangan' yang lebih baik, dan bukan benar-benar ingin melenyapkan sistem liberalisasi ekonomi secara sejati.

Direktur IGJ, Rachmi Hertanti, menyampaikan mengenai pengalaman Indonesia menghadapi gugatan Amerika Serikat dan New Zealand di WTO terkait dengan kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia sejak 2014. Hasilnya, Indonesia kalah dan diwajibkan mengganti undang-undang Pangan dan hortikultura nya agar tidak bertentangan dengan WTO, dan merugikan kepentingan negara lain. Padahal Undang-undang Pangan dan Hortikultura tersebut sangat penting dalam memberikan dukungan kepada Petani Indonesia. Tetapi karena Indonesia terikat dengan WTO, maka undang-undang nasional Indonesia diwajibkan untuk harmonis dengan isi perjanjian WTO.

Hal ini tentunya menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Karena perjanjian WTO, pembuatan undang-undang nasional Indonesia tidak lagi harus mengacu kepada Konstitusi tetapi harus mengacu pada perjanjian internasional.

Bahkan, saat ini dibawah agenda perang dagangnya, Amerika Serikat melakukan tekanan kepada Pemerintah Indonesia untuk mau melakukan review kembali terhadap transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Amerika yang dituangkan di dalam General Preferential System (GSP). Amerika merasa pemberian tariff kepada Indonesia di bahwa GSP masih belum menguntungkan mereka.

Dalam menghadapi situasi global yang mengarah pada kebijakan proteksionisme, Pemerintah Indonesia malah saat ini mendorong pemassifan agenda pasar bebas di Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan berbagai blok perdagangan regional seperti ASEAN Regional Comprehensive Partnership

Agreement (RCEP), dan kerjasama perdagangan bilateral lainnya seperti dengan Uni Eropa.

Disadari bahwa perdagangan bebas tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, bahkan semakin membuat ketergantungan dengan produk impor ketimbang menggunakan produk dalam negeri. Harga lokal yang tidak kompetitif dengan impor membuat pelaku usaha lokal, atau bahkan industry lokal Indonesia tidak berkembang. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia semakin bergantung pada kehadiran investor asing. Hal inilah yang pada akhirnya Indonesia seringkali menjadi korban dari kerakusan korporasi multinasional yang menggunakan perjanjian perdagangan dan investasi internasional untuk melindungi kepentingannya.

Menurut Rachmi, Akibat dari penandatanganan Perjanjian investasi internasional Indonesia sudah mengalami beberapa kali digugat oleh Investor asing di lembaga arbitrase internasional. Sebanyak 50% dari total kasus, berada disektor tambang. Dari kasus gugatan tersebut, investor asing meminta klaim ganti rugi kepada Indonesia hingga milyaran dollar. Tentu ini hanya akan menguntungkan korporasi ketimbang Indonesia.

Bahkan saat ini negara-negara maju di utara hendak mendorong mekanisme gugatan investor terhadap negara ke berbagai perjanjian perdagangan bebas yang sedang dirundingkan. Untuk semakin menancapkan kuku kekuasaannya di negara selatan. Oleh karena itu, perlawanan terhadap agenda pasar bebas, anti-globalisasi, harus direbut kembali menjadi perlawanan rakyat. Dan bukan perlawanan kaum kanan yang memanfaatkan isu anti-globalisasi untuk memperkuat dukungan politik semata. Bahwa perlawanan terhadap kekuatan korporasi multinasional yang berada dibalik semua ini, harus menjadi yang utama.****

## Penutup

Forum sepakat bahwa, agenda perlawanan terhadap agenda pasar bebas, khususnya penolakan terhadap mekanisme ISDS, yang didominasi oleh kepentingan TNCs harus diperkuat kedepannya dan bagaimana rakyat bisa merebut kembali perjuangan sejati atas keadilan ekonomi dari tangan rezim otoriter hari ini yang berkuasa. Keadilan Global harus ditegakkan. **

**Untuk informasi hubungi :**

**Indonesia for Global Justice**
**Komplek PLN Duren Tiga,**
**Jl.Laboratorium No.7, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, Indonesia.**
**Email: igj@igj.or.id / Website: www.igj.or.id Telp: +62-21-7984552**

INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE